Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKI

Debi Sintia¹, Maria Maria², Rosy Armaini³

Alumni Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia ^{2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia * Corresponding: debisintia00@gmail.com

Abstrak

Riset ini bermaksud guna mengidentifikasi dan menguji "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten OKI". Populasi dalam riset ini yaitu OPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berjumlah 53 OPD, metode pengambilan sampel memakai sampel jenuh. Responden riset ini yaitu Kepala OPD, Kepala Bidang di masing-masing OPD, Bendahara, dan Staff bagian keuangan. SPSS untuk Windows versi 25 digunakan untuk melakukan analisis regresi linier berganda. Pelaporan keuangan pemerintah daerah meningkat 34,6 persen sebagai hasil dari penggunaan metode akuntansi keuangan daerah serta kemampuan instansi pemerintah dan teknologi informasi secara bersamaan, menurut hasil pengujian. Sampai batas tertentu, kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah ditingkatkan oleh sistem akuntansi keuangan daerah dan kemampuan instansi pemerintah, tetapi teknologi informasi tidak berdampak besar pada kualitas ini.

Kata kunci: SAKD; Kompetensi Aparatur Pemerintah.

Abstract

This research aims to analyze and examine the influence of the application of the regional financial system, the competence of government officials, and the use of information technology to the quality of reports from the local government of the OKI Regency. The population in this study is OPD in Ogan Komering Ilir Regency which opened 53 OPD, the sampling method used a saturated sample. The respondents of this research are the Head of OPD, Head of Division in each OPD, Treasurer, and Staff of the Finance Department. SPSS for Windows version 25 was used to perform multiple linear regression analysis. Local government financial reports increased 34.6 percent as a result of using local financial accounting methods as well as the capabilities of government agencies and information technology simultaneously, according to the test results. To some extent, the quality of local government reporting is improved by local financial accounting systems and the capabilities of government agencies, but information technology does not have a major impact on this quality.

Keywords: SAKD; Competence of Government Apparatus

I. PENDAHULUAN

Akuntabilitas telah menjadi tuntutan populer untuk tata pemerintahan yang baik di Indonesia, yang telah mendorong pemerintah pusat dan kota di Jakarta dan kota-kota besar lainnya untuk menerapkan akuntabilitas publik dalam operasi mereka sendiri. UU/No. 17/2003 tentang Keuangan Negara memungkinkan manfaat tersebut dapat terwujud. Agar pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka harus memiliki tata kelola yang baik.

Meskipun pelaporan keuangan pemerintah daerah umumnya tidak sepenuhnya dipercaya oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK menyebutkan beberapa alasan ketidakpercayaan ini, termasuk sistem pengendalian internal yang lemah dan peraturan negara bagian dan daerah yang longgar tentang real estat, produk, dan layanan. Dari sisi keuangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengadaan jasa, pelaporan keuangan belum berdasarkan dengan SAP, dan kemampuan sumber daya manusia kurang pada manajemen keuangan Pemda.

Perbendaharaan Daerah Kabupaten OKI tidak akan memiliki cadangan anggaran pada tahun 2021. BPKAD Kabupaten Oki dinilai kurang profesional dalam pengelolaan dana daerah oleh Sekretaris Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) DPW Tingkat II Bagus Saputra. Prioritas harus diberikan pada tuntutan daerah dan jumlah APBD pada saat itu. Berdasarkan PERPU/No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, guna mengatasi intimidasi terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan nasional perlu digunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang fleksibel dan kehati-hatian. Otoritas APBN dan APBD, katanya, mengabaikan penekanan yang ditempatkan dalam Pasal 66 UU/No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan APBN dan APBD saat mengambil keputusan tentang hak pemanfaatan sumber daya alam untuk anggaran daerah.

Jenjang pendidikan karyawan dalam pemerintah Kabupaten OKI terletak dalam tingkat magister, sarjana, dan Diploma III. BPKAD Kabupaten OKI mempekerjakan sejumlah orang dengan gelar di bidang ekonomi pembangunan dan akuntansi. Pada bagian keuangan atau akuntansi, sebagian besar personel telah mampu menghasilkan financial statements berwujud anggaran dan neraca. Sebagian besar pekerja BPKAD pula memahami undang-undang dan prosedur yang mengatur pembuatan laporan keuangan pemerintah. Hal ini menjadi ke khawatiran tersendiri bagi pemerintah kabupaten OKI, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan menjadi fenomena yang bisa mempengaruhi mutu financial statements. Pegawai yang ditempatkan tak sesuai dengan bidang keahliannya, tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada OPD lain di Pemerintah Kabupaten OKI. Dengan adanya fenomena ini pegawai yang tak mempunyai background pendidikan akuntansi atau ekonomi tentunya tidak memahami SAP dengan baik, hal ini bakal mempengaruhi mutu laporan keuangan sampai prinsip akuntabilitas dalam penerapan good governance bakal susah digapai. Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut, alhasil peneliti berminat guna melaksanakan riset dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKI".

II. KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut permendagri No.64 tahun 2013 bahwa "sistem akuntansi keuangan daerah merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain

108

https://journals.telkomuniversity.ac.id/jaf E-ISSN 2581-1088

DOI: 10.25124/jaf.v6i2.5198

untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keungan di lingkungan organisasi pemerintah daerah". Berlandaskan penelitian Botutihe (2013) bahwa penerapan SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah hal ini ditunjukkan pada koefesien determinasi yang menunjukkan besaran pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah laporan keuangan pemerintah Gorontalo sebesar 80%.

H1: Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKI

Kompetensi Aparatur Pemerintah

Kompetensi menurut Moeheriono (2009), didefinisikan sebagai kemampuan mereka untuk berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan cara tertentu pada titik waktu tertentu, serta kesimpulan mereka. Ketika seseorang kompeten, dia menggunakan wawasan dan kemampuannya untuk bekerja dengan cepat, mudah, naluriah, dan dengan kesalahan minimal. Berlandaskan penelitian Handayani (2021) yang menyatakan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

H2: Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKI

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatanteknologi informasi adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Menurut Setiowati, dkk (2016) menyatakan pemanfaatan sistem informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laopran keuangan pemerintah daerah.

H3: Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKI

III. METODE PENELITIAN

Tipe riset yang dipakai adalah riset kuantitatif. Riset ini dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten OKI. Jumlah populasi dalam riset ini yaitu sekitar 53 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten OKI yang terbagi jadi 7 Badan 23 Dinas,18 Kecamatan, 2 satuan dan 2 Sekretariat. Responden yang diambil yaitu semua pelaku pengadaan pada tiap OPD (5 orang). Sampel dalam riset ini sampel jenuh ialah semua populasi (53 OPD) ikut diteliti. Riset ini memakai data primer yang didapat lewat tanggapan atas angket yang telah disebarkan terhadap responden. Teknik pengumpulan data pada riset ini Studi Pustaka, Observasi, dan Angket/kuesioner. Pengelohan data pada riset ini memakai *SPSS* 25. Analisa regresi linier berganda adalah metode analisa data yang dipakai pada riset ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Priyatno (2017:39) menjelaskan kalau analisis deskriptif dapat dipakai untuk menggambarkan data statistik, seperti skewness dan kurtosis dari data sampel, serta standar deviasi, varians, dan range.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

					Std.				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Deviation				
Sistem_Akuntansi_Keuangan_Daerah	182	31	40	36.53	1.729				
Kompetensi_Aparatur_Pemerintah	182	24	35	31.69	1.804				
Pemanfaatan_Teknologi_Informasi	182	26	35	31.27	1.545				
Kualitas_Laporan_Keuangan	182	35	45	41.16	1.833				
Valid N (listwise)	182								

(Sumber: Data yang diolah,2022)

Variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1) memiliki nilai minimal 31 dan nilai maksimal 40, seperti terlihat pada Tabel 4.1. Standar deviasi lebih dari 1,729, dengan rata-rata 36,53 dan standar deviasi tanggapan responden. Hanya 24 dan 35 kemungkinan nilai untuk variabel kapasitas instansi pemerintah (X2). Standar deviasi data lebih besar dari standar deviasi 31,69, menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan lebih tinggi. Sebagai contoh variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) berkisar antara 26 sampai dengan 35. Jawaban dari peserta survei memiliki rerata 31,27, lebih tinggi dari standar deviasi yaitu 1,545. Terdapat nilai maksimum dan terendah untuk Kualitas Pelaporan Keuangan (Y). Dalam hal standar deviasi (SD) 1,833 lebih rendah dari rata-rata (mean) tanggapan adalah 41,16.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis korelasi antara dua atau lebih variabel bebas (SAKD, kapasitas peralatan pemerintah, dan penggunaan TI) dan variabel dependen (kualitas pelaporan keuangan) menggunakan model regresi linier berganda yang dibangkitkan menggunakan *software SPSS for Windows* versi 25.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics				
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF			
1 (Constant)	15.595	3.473		4.490	.000					
X1	.535	.066	.504	8.052	.000	.936	1.068			
X2	.204	.064	.201	3.203	.002	.931	1.074			
X3	014	.072	012	201	.841	.995	1.005			
a. Dependent Variable: Y. T										

(Sumber: Data yang diolah,2022)

Pengaruh Penerapan SAKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKI

Peneliti melakukan pengujian hipotesis dan menemukan bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah kabupaten OKI meningkat dengan penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Karena poin t hitung sekitar 8052 >nilai t tabel sekitar 1,97338 dan poin probabilitas 0,000 < 0,05 maka variabel sistem akuntansi keuangan daerah dinilai berdampak positif dan signifikan, sehingga bisa ditetapkan kalau " H_0 ditolak dan H_1 diterima". Berdasarkan perhitungan itu alhasil pengujian hipotesis sudah terbukti: Ada dampak baik dan signifikan dari implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (X1) pada Mutu Laporan Keuangan (Y) dalam Pemerintah Kabupaten OKI. Penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan dampak yang baik dan signifikan sebesar 80,6 persen pada mutu pelaporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo, menurut Botutihe (2013).

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

110

https://journals.telkomuniversity.ac.id/jaf E-ISSN 2581-1088

DOI: 10.25124/jaf.v6i2.5198

Pemerintah Kabupaten OKI

Sesuai dengan temuan tes hipotesis yang dilaksanakan oleh penulis, didapat hasil yang menyampaikan kalau variabel kompetensi aparatur pemerintah berdampak positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten OKI. Karena poin t hitung sekitar 3,203 > nilai t tabel sekitar 1,97338 dan tingkat signifikansi 0,002 < 0,05 maka variabel sistem akuntansi keuangan daerah dinilai berdampak positif dan signifikan, sehingga bisa ditetapkan kalau " H_0 ditolak dan H_1 diterima". Berlandaskan perhitungan itu alhasil pengujian hipotesis sudah terbukti: Ada dampak yang baik dan signifikan Kompetensi Aparatur Pemerintah (X2) pada Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pada Pemerintah Kabupaten OKI".

Berdasarkan temuan penelitian Handayani (2021), kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat ditingkatkan secara signifikan oleh kompetensi aparatur pemerintah. Maka semakin baik kompetensi aparatur alhasil hal tersebut bakal berpengaruh terhdap mutu laporan keauangan pemerintah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKI

Riset yang dilakukan pada variabel penggunaan IT menghasilkan poin t hitung sekitar -0,201 yang < poin t tabel (1,97338) dan tingkat signifikansi keseluruhan sebesar 0,841 > 0,05, sampai bisa ditetapkan kalau " H_0 diterima dan H_1 ditolak". Sesuai dengan perhitungan itu alhasil pengujian hipotesis sudah terbukti: "Tak ada dampak secara signifikan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) pada Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pada Pemerintah Kabupaten OKI".

Tidak ada perbedaan yang substansial pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah antara menggunakan sistem informasi dan tidak menggunakannya, seperti yang ditemukan oleh Setyowati, Isthika, dan Pratiwi (2016). Masih kurangnya penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah oleh pemerintah, terbukti dengan sistem teknologi informasi yang lebih baik ini belum tentu dapat diterapkan karena pemerintah belum siap. Tidak semua administrasi keuangan dan akuntansi serta penyusunan laporan terkomputerisasi; beberapa tugas masih dilakukan dengan tangan. Banyak komputer di jaringan internet yang terhubung, tetapi karyawan masih tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya sumber daya ini untuk mengirimkan informasi dan berkomunikasi dengan rekan kerja. Masih banyak aparatur dan instansi pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang belum memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi yang ada karena pemerintah masih belum memanfaatkannya secara maksimal.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan hasil analisa data yang telah dilaksanakan oleh penulis dalam bab IV mengenai "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan", maka dapat ditarik kesimpulan: Pengaruh yang baik dan cukup besar pada mutu laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten OKI bisa diperoleh melalui hasil pengujian hipotesis pertama. Kemampuan mesin pemerintah di Kab. OKI mempunyai dampak yang menguntungkan dan signifikan dalam mutu laporan keuangan pemerintah daerah, berdasarkan temuan pengujian hipotesis kedua. Penggunaan IT di Kab OKI tidak berdampak substansial pada mutu pelaporan keuangan pemerintah daerah, berlandaskan hasil hipotesis ketiga.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten OKI meningkat secara signifikan ketika sistem akuntansi keuangan daerah, kemampuan instansi pemerintah, dan penggunaan IT

111

diuji secara bersamaan atau bersamaan. Berdasarkan hasil Koefesien Determinasi (R2) sekitar 0,346 hal ini dijelaskan kalau variabel X ("sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi") dengan variabel Y (mutu laporan keuangan).

DAFTAR PUSTAKA

- Botutihe, T. H. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. *Skripsi*, 1(241408102).
- Fauziyah, E. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Serang). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*.
- Hidayati, S. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan, *Skripsi*.
- Moehirono. (2009). Pengaruh Kinerja Berbasis Kompetensi. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Nurillah, As Syifa. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Tekhnologi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Peraturan Presiden No.38 Tahun 2017, tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Sistem Akuntansi Keuangan Dearah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Permadi, A, D. (2013). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Dinas Bina Marga Kota Bandung. *Skripsi. Universitas Widyatama Bandung*.
- Priyatno, D. (2012). Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Setowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*, 20(2), 179-191.